

**PERSAINGAN AMERIKA SERIKAT – RRT KEPADA INDONESIA DAN  
PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pada Departemen Ilmu  
Hubungan Internasional*

Oleh :

**MUH AINUL AMAL**

**E061171313**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**



## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERSAINGAN AMERIKA SERIKAT - RRT KEPADA  
INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK  
LUAR NEGERI BEBAS - AKTIF

N A M A : MUH. AINUL AMAL

N I M : E061171313

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Makassar, 8 Juli 2021




Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Drs. Patrice Lumumba, MA  
NIP. 196110121987011001

  
Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si  
NIP. 197101092008012005

Mengesahkan :  
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



H. Darwis, MA., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003



## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERSAINGAN AMERIKA SERIKAT - RRT KEPADA  
INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP POLITIK  
LUAR NEGERI BEBAS - AKTIF

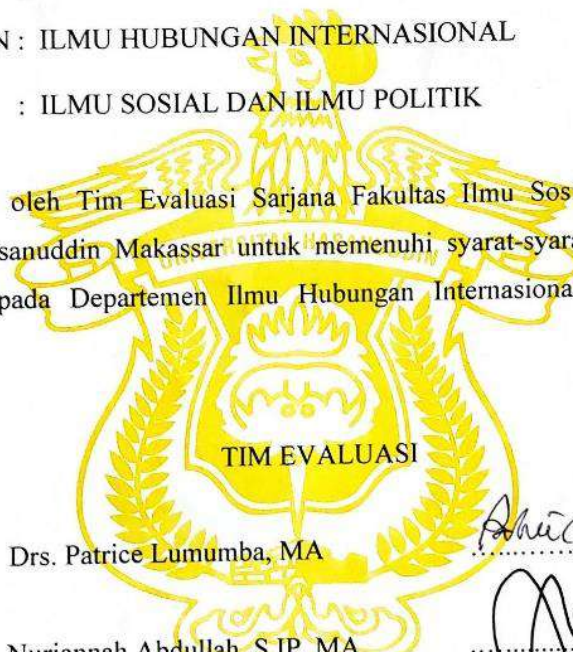
N A M A : MUH. AINUL AMAL

N I M : E061171313

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 8 Juli 2021.



Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Sekretaris : Nurjannah Abdullah, S.IP, MA

Anggota : 1. Drs. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Pusparida Syahdan, S.Sos, M.Si

*Abu*  
*Nurjannah*  
*Munjin*  
*Pusparida*





## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Ainul Amal  
Nomor Induk : E061171502  
Judul Skripsi : Persaingan Amerika Serikat-RRT Kepada  
Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Politik  
Luar Negeri Bebas-Aktif

Bahwa benar adanya karya ilmiah saya dan bebas dari plagiarisme (duplikasi).  
Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti  
ketidakaslian atas karya ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan  
sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Makassar, 12 Juli 2021



Muh Ainul Amal



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahrabbi'alamin, Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadirat Allah SWT dan shalawat baginda Rasulullah SAW atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Penulis benar-benar menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak kekurangan, baik dari segi penulisan dan pembahasan yang memerlukan penyempurnaan.

Pencapaian ini tentunya tidak luput dari bantuan dan kerja sama yang luar biasa dari berbagai pihak yang dengan ikhlas telah memberikan arahan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua saya, yaitu Bapak **Patrice Lumumba** dan Mama **Andi Tenri Tungka** Terimakasih untuk seluruh pengorbanan dan dukungan yang tidak henti-hentinya diberikan kepada penulis.
2. Kepada Saudara-saudara saya **Muh Teguh Prawira** dan **Ikhwanul Aulia** yang dengan sabar, senantiasa memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada **Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA.,**
4. Kepada **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr.**

**Armin, M.Si.,** serta seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.



5. Kepada Bapak **H. Darwis MA, P.h.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional
6. Kepada Bapak **Drs. Patrice Lumumba, MA** selaku dosen pembimbing I  
Terimakasih banyak atas semua bantuan, pengorbanan waktu, dan ilmunya,  
dan Ibu **Pusparida Syahdan. S.Sos.M.Si**. Terimakasih banyak atas semua ilmu yang telah diberikan.
7. Kepada seluruh dosen-dosen Ilmu Hubungan Internasional, Pak **Husain Abdullah, Kak Nurjannah, Pak Adi Suryadi, Ibu Seniwati, Pak Munjin, Pak Aspiannor, Pak Bur, Pak Ishaq, Pak Nasir Pak Agus, Pak Ashry Sallatu, Pak Aswin, Kak Aca, Kak Bama**, Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
8. Kepada Staf Departemen Hubungan Internasional **Kak Rahma, Ibu Tia, Ibu Fatma**, dan **Pak Ridho** juga **Kak Ita**. Terimakasih telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam pengurusan administrasi.
9. Kepada Keluarga besar penulis tanpa terkecuali yang telah mendukung dalam segala hal Terimakasih banyak.
10. Kepada Teman-teman seangkatan **LIBERTE 2017** yang punya peran besar di dunia kampus, Terimakasih banyak untuk kalian semua.
11. Kepada Teman-teman seperjuangan selama perkuliahan **Fadil Aidhil, Andika Arafah, Emil Muhammad Hasyir, Agung Alfarizi, A. M. Yusuf Islam, Rifqi Zulfahmi, Danurya Dwi A, Sayyidah Nisa, Isa Sabriana, Suci Fitriwati, Cici Rindiani, Dian Triana, Ardela Fahirah**. Terimakasih  
as segalanya, sampai jumpa dipuncak karir teratas kita masing-masing.



12. Kepada **Farhan Ilman Badai, Yusril Partang, Agung Prawoto, Dwiki Aditya, Alief Anshary, Miftah Coeg, Dion Darmawan, Afiq Fauzan, Sugi Astarahma, Fara Fahirah, Rahmatia, Pipria** Terimakasih untuk semuanya.
13. Kepada **HIMAHI Fisip Unhas** Terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
14. Kepada **ALORNS** Teman-teman seperjuangan di SMANSES Makassar Terimakasih atas supportnya selama ini.
15. Kepada **Syanirah, Annisa Nadila, Andi Dea, Fitrah Anggraini, Arzeti Irzal Irfandi, Khadafi, Wiwi Adhayani, Ima Sudirman, Finka, Iqbal Ridho, Rama, Andi Ishak Uya, Cali, Welly, Firdaus, Fathur, Salman, Farhan,** Terimakasih atas dukungan dan bantuannya selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada Teman-teman KKN Gowa 8 Terimakasih telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman dari berbagai disiplin ilmu kepada penulis selama menjalani masa-masa KKN.

Akhir kata Penulis ucapkan Terimakasih banyak kepada pihak-pihak yang tidak sempat disebutkan namanya, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.



## ABSTRAK

Muh Ainul Amal, E061171313 “Persaingan Amerika Serikat – RRT Kepada Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Politik Luar Negeri-Bebas Aktif”. Dibawah bimbingan Drs. Patrice Lumumba, MA, selaku pembimbing I, dan Pusparida Syahdan, S.os.,M.Si., selaku pembimbing II, pada Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang persaingan Amerika Serikat-RRT Kepada Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Politik Luar Negeri Bebas-Aktif. Di mana, persaingan antara kedua negara terjadi di wilayah Indo-Pasifik, yang merupakan Halaman belakang wilayah Indonesia. Substansi persaingannya, meliputi: Perang Dagang, dan perebutan kepentingan dan pengaruh di Laut China Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah metode analisis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang latar belakang persaingan kedua negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah telaah Pustaka yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, surat kabar harian, yang berkaitan dengan materi skripsi ini. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menganalisis Latar Belakang persaingan kedua negara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan antara Amerika Serikat – RRT melingkupi bidang-bidang Ekonomi dan Perdagangan dan militer-strategis. Dimana keduanya saling berlomba untuk mengungguli satu sama lain. Dalam persaingan di antara kedua negara tersebut, masing-masing ingin melibatkan Indonesia untuk bersatu dalam pihaknya yakni kepada Amerika Serikat atau kepada RRT. Namun, Indonesia yang menganut prinsip politik luar negeri Bebas-Aktif, tentu tidak akan memihak kepada Amerika Serikat ataupun kepada RRT.

Kata Kunci : Persaingan, Amerika Serikat, RRT, Politik Luar Negeri Bebas-Aktif





## ABSTRACT

Muh Ainul Amal, E061171313 “The United States – China Competition To Indonesia and its Influence on Free-Active Foreign Policy”. Under the guidance of Patrice Lumumba, as supervisor I, and Pusparida Syahdan, as supervisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to describe the United States-China Competition To Indonesia and its Influence on Free-Active Foreign Policy. Wherein, the competition between the two countries occurs in the Indo-Pacific region, which is the backyard of the Indonesian territory. The substance of the competition, includes: Trade War, and struggles for interest and influence in the South China Sea.

The research method used in writing this thesis is descriptive analysis method, which aims to describe facts about the background of the competition between the two countries. The data collection technique used is library research which is sourced from various literatures such as books, scientific journals, articles, daily newspapers, which are related to the material of this thesis. Qualitative data analysis techniques were used to analyze the background of the competition between the two countries.

The results of this study indicate that the competition between the United States - China covers the fields of Economics and Trade and Military-Strategic. Where both of them are competing to outperform each other. In the competition between the two countries, each wants to involve Indonesia to unite on its side, namely to the United States or to China. However, Indonesia, which adheres to the principle of a Free-Active foreign policy, certainly will not side with the United States or China.

Keywords: Competition, United States of America, China, Free-Active Foreign Policy



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Kerangka Konseptual.....	15
E. Metode Penelitian.....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>19</b>
A. Konsep Tentang Persaingan.....	19
B. Konsep Tentang Kebijakan Politik Luar Negeri.....	21
C. Konsep Tentang Kepentingan Nasional.....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERSAINGAN AMERIKA SERIKAT-RRT DAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA BEBAS-AKTIF</b> .....	<b>37</b>
A. Persaingan Amerika Serikat-RRT.....	37
1. Latar Belakang Persaingan.....	37
2. Substansi Persaingan.....	41
B. Politik Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif.....	58
1. Landasan Bebas-Aktif.....	58
2. Maksud dan Tujuan Bebas-Aktif.....	60
<b>BAB IV WUJUD PENGARUH PERSAINGAN AMERIKA SERIKAT-RRT TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF</b> .....	<b>63</b>
1. Pengaruhnya Terhadap Independensi Bebas-Aktif.....	63
2. Pengaruhnya Terhadap Kepentingan dan Tujuan Nasional.....	72
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN</b> .....	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-Saran.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>81</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Dunia Internasional Dewasa ini, diistilahkan dengan persaingan Timur-Barat Jilid II, yakni antara Amerika Serikat (Barat) dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (Timur). Jika pada masa Perang Dingin (1990 ke bawah), Dunia Internasional terpola ke dalam dua kekuatan utama, yakni Amerika Serikat dengan Uni Soviet (Barat-Timur). Namun, pasca Perang Dingin 1990-an hingga sekarang, Dunia Internasional terpola pada persaingan Amerika Serikat – RRT sebagai Representasi Dunia Barat dan Dunia Timur.

Hal ini bila mengacu pada fokus penilaian pada bidang-bidang Politik, Ekonomi, Industri dan Teknologi, Masalah Strategis, serta militer. Di mana, Kedua Negara (Amerika Serikat - RRT) masing-masing dianggap telah mendominasi bidang-bidang tersebut di atas, dan memiliki friksi yang tajam, serta pengaruh yang dapat membahayakan Dunia.

Era pasca perang dingin, sebenarnya memberi kesempatan kepada Amerika Serikat untuk memainkan peran tunggal sebagai satu-satunya negara yang masih tampak kuat. Akan tetapi posisi keunggulan Amerika Serikat ini tidak bertahan lama karena Amerika Serikat dilanda multi-krisis. Dengan kata lain, tatanan dunia yang ditopang oleh Amerika Serikat sejak berakhirnya Perang Dunia II, telah retak atau bahkan telah tumbang yang menyebabkan



Amerika Serikat kehilangan Keunggulan atau Supremasi selaku negara terkuat di dunia selama ini.<sup>1</sup>

Di balik kemunduran Amerika Serikat, RRT justru mengalami kebangkitan yang kini berubah dengan cepat menjadi sebuah negara super power baru. Hanya dalam waktu 30 tahun, RRT mengubah dirinya dari negara berkembang menjadi negara dengan kemampuan ekonomi yang setara dengan Amerika Serikat.

Sebuah negara akan mendapatkan status super power jika negara tersebut mampu meraih posisi-posisi puncak dalam pengembangan ekonomi, militer, teknologi, dan budaya. Dalam konteks inilah kita melihat China sedang bangkit dan bekerja sangat keras untuk meraih posisi-posisi puncak pada bidang-bidang tersebut di atas. Upaya keras yang seolah-olah tanpa akhir yang dilakukan China sejak Deng Xiaoping melancarkan kebijakan keterbukaan membuahkan capaian-capaian luar biasa dalam bidang-bidang diatas. Sebagai konsekuensi logis dari kebangkitan China yang sangat dinamis ini rivalitas dengan Amerika Serikat pun menjadi tak terhindarkan.

China berada pada posisi sedang berusaha merebut status super power dari tangan Amerika Serikat. Di pihak lain kita melihat bagaimana Amerika Serikat selaku super power yang sesungguhnya berusaha menghalangi tumbuhnya pesaing baru dalam rivalitas antarnegara besar. Bagi Amerika Serikat perebutan status ini merupakan yang ketiga kalinya. Kali pertama,

h pada saat Amerika Serikat secara bertahap menggantikan status super

---

<sup>1</sup> Bambang Cipto, Strategi China Merebut Status Superpower. Yogyakarta: Pustaka Jar, Hal 6



power dari Inggris, yang pernah mendapat julukan “penguasa laut” (Britannia Rules The Waves) pasca Perang Dunia II. Kali kedua, adalah pada saat Amerika Serikat sebagai wakil dunia Barat (liberal kapitalis) bersaing ketat dengan dengan Uni Soviet (Rusia) sebagai representasi dari dunia Timur (komunis sosialis). Amerika Serikat menggantikan Inggris sebagai negara paling kuat sekitar tahun 70-an tanpa melalui konflik maupun peperangan. Proses pergantian berlangsung secara alamiah tanpa paksaan sama sekali. Sementara proses munculnya Amerika Serikat sebagai super power tunggal memerlukan sebuah Perang Dingin yang mempertemukan dua super power dalam sebuah rivalitas sengit yang berlangsung sejak berakhirnya Perang Dunia II, hingga runtuhnya Uni Soviet di akhir dekade 90-an. Pasca Perang Dingin, Amerika Serikat tampil sebagai super power tunggal yang nyaris tanpa tandingan.

Kini Amerika Serikat kembali berhadapan dengan negara global yang berambisi menjadi super power. China, sebuah negara Asia yang di masa lalu pernah menjadi negara besar dan disegani, kini muncul kembali sebagai satu-satunya negara di dunia yang berani menantang superioritas Amerika Serikat di dunia internasional. Keberanian China bermimpi menjadi super power bukan tanpa alasan yang jelas. Negara dengan jumlah penduduk terbanyak, perekonomian terkuat kedua setelah Amerika Serikat, kemampuan sains, teknologi, dan militer yang terus berkembang sangat pesat dan berada posisi yang hampir sejajar dengan Amerika Serikat membuat China tidak merasa ragu untuk menyatakan ambisinya menjadi super power.





Selama beberapa tahun terakhir China merupakan salah satu negara dengan ekonomi terbesar. Kekuatan ekonomi inilah yang menopang kebijakan China untuk memperkuat bidang teknologi dan militernya. Dewasa ini sulit dipungkiri bahwa kemajuan sains dan teknologi China berada pada posisi yang sangat dekat dengan Amerika Serikat. Jika di masa lalu China dikenal sebagai negara yang hanya mampu meniru teknologi Amerika Serikat, kini kesan sebagai peniru tersebut berangsur-angsur mulai berganti dengan kekaguman Barat terhadap berbagai terobosan teknologi modern. Sebagai contoh, China adalah negara pertama yang menerapkan teknologi Artificial Intelligence untuk mengenali wajah manusia. Bahkan, China bergerak lebih jauh memanfaatkan teknologi tersebut untuk merekam berbagai data pribadi warganya. Meluasnya penggunaan teknologi tersebut di China diikuti oleh negara lain khususnya Amerika Serikat.

Kemajuan China dalam bidang militer pun bisa dikatakan mendekati garis perbatasan dengan teknologi militer Amerika Serikat. Dewasa ini, China sedang melakukan riset teknologi hypersonic yang memiliki fungsi ganda baik untuk keperluan sipil maupun militer. Angkatan laut China pun mulai dikhawatirkan akan segera menyaingi kemampuan angkatan laut Amerika Serikat.

Berbagai kemajuan luar biasa dalam bidang ekonomi, teknologi, dan militer China sangat berbeda dibandingkan dengan kemajuan ekonomi, teknologi, dan militer Rusia di era Uni Soviet. Saat itu selaku super power Uni Soviet lebih banyak mengandalkan kekuatan militernya dalam persaingan dengan Amerika Serikat. Kemajuan teknologi Uni Soviet belum mencapai



titik yang mengkhawatirkan Amerika Serikat pada saat itu. Sementara kebijakan Mikhail Gorbachev untuk melakukan restrukturisasi ekonomi (perestroika) dan keterbukaan politik (glasnost) justru mengakibatkan kehancuran Uni Soviet. Kehancuran inilah yang menurunkan statusnya dari super power menjadi negara besar yang kuat namun sudah tidak terlalu menjadi ancaman bagi Amerika Serikat dewasa ini.

Belajar dari kegagalan Uni Soviet, China menghindari kebijakan keterbukaan politik yang sangat diharapkan Barat akan dilakukan China. Penolakan China untuk menjalankan kebijakan keterbukaan politik sebagaimana diharapkan Barat merupakan strategi yang tepat untuk menghindari jebakan demokrasi yang dialami Uni Soviet. China kemudian fokus pada pengembangan ekonomi, teknologi, dan militer. China memilih cara untuk meningkatkan supremasi dalam bidang ekonomi, teknologi dan militer sambil pada saat yang sama mendorong seluruh elemen bangsa untuk menjadikan China sebagai negara super power.

Strategi ini menghasilkan sebuah drama besar di abad ke-21 ketika sebuah negara berkembang dalam waktu singkat mengubah dirinya menjadi sebuah kekuatan global yang memiliki potensi memainkan peran sebagai sebuah super power baru. Dunia pernah memiliki dua super power di masa Perang Dingin sehingga tetap terbuka kemungkinan bagi munculnya lebih dari satu super power. Persoalannya adalah apakah Amerika Serikat bersedia

prima kehadiran super power lain di dunia ini. Jika tidak, apakah Amerika Serikat akan membiarkan China merebut status super power tanpa wanan sama sekali.



Jika memperhatikan perkembangan rivalitas Amerika Serikat vs China, tampaknya Amerika Serikat belum siap dan belum bersedia menerima kehadiran China sebagai super power baru. Kebijakan Obama melakukan pengepungan terhadap China dengan dalih pengalihan perhatian Amerika Serikat dari Kawasan Timur Tengah. Penerepan kebijakan kebebasan navigasi dikawasan Laut China Selatan. Kebijakan Perang Dagang sebagai upaya Trump untuk mengendalikan kebangkitan global ekonomi China.

Semua itu mencerminkan kegamangan Amerika Serikat menghadapi kebangkitan China sebagai kekuatan global yang tampaknya tidak mudah ditaklukan. Amerika Serikat tampak belum siap menerima kehadiran super power lain dalam percaturan politik ekonomi global. Amerika Serikat berusaha meyakinkan publik dunia bahwa di dunia ini hanya ada satu super power yang berhak mengendalikan masa depan dunia. Setiap upaya untuk mengubah asumsi itu akan dihadapi dengan kekuatan militer.

Kebangkitan RRT dalam membangun perekonomiannya, dari negara berkembang menjadi ekonomi terbesar di dunia. Dengan jumlah penduduk 1,3 miliar, RRT sebenarnya sudah merupakan kekuatan global yang tidak dapat dipandang remeh. Kemajuan-kemajuan RRT dalam pendidikan, sains, teknologi, dan militer-strategis, telah mengubah RRT, dari negara berkembang menjadi kekuatan global.

Publik Internasional kini melihat betapa kebangkitan ekonomi RRT sudah tak dapat dibendung, menimbulkan rasa terancam di kalangan elit Amerika Serikat. Walaupun tidak mudah memperkirakan kapan kepastian



RRT benar-benar berubah menjadi super-power, akan tetapi serangkaian prestasi yang telah diperlihatkan RRT dalam bidang: politik luar negeri, ekonomi, sains dan teknologi, dan bidang strategis lainnya, menjadi indikator bahwa RRT sedang bergerak maju menuju status super-power.

Sebuah negara mencapai status superpower, apabila negara tersebut berada pada puncak kekuatan militer, politik, ekonomi, dan budaya.<sup>2</sup> Sudah barang tentu, dengan terus-menerus meningkatkan kekuatan negara dalam bidang-bidang paling strategis tersebut, maka negara dapat meraih status super-power. Selain itu, Kejatuhan Imperium Uni Soviet pada tahun 1991, secara tidak langsung memberikan peluang kepada RRT menjadi Kompetitor hegemoni Amerika Serikat di panggung Internasional. Sebagai the rising country, RRT memang berpotensi menjadi negara hegemoni dunia.<sup>3</sup>

Bahkan, pemimpin China Xi Jinping memaparkan grand strategy yang merupakan rencana besar jangka panjang pembangunan seluruh aspek kehidupan bangsa China. Grand strategy inilah diharapkan untuk menjadikan China sebagai negara sosialis yang modern, kuat dan makmur pada 2050. Rencana besar ini tidak hanya dibicarakan secara resmi, namun juga dimasukkan ke dalam konstitusi partai baru sebagai jaminan bahwa para pemimpin China masa depan akan menjadikan apa yang tertuang didalamnya sebagai acuan utama dalam menjalankan kebijakan. Dengan kata lain, Xi Jinping telah meletakkan landasan pembangunan China menuju status super

er dalam 30 tahun mendatang. Sebuah kebijakan yang sangat ambisius

<sup>2</sup>Bambang Cipto, Ibid hal 12

<sup>3</sup>Bambang Cipto, Ibid hal 156



dan membuat negara-negara Barat bersiap-siap menghadapi China yang semakin terus berkembang.

Doktrin ‘China Dream’ yang dicanangkan oleh Xi Jinping merupakan tekad untuk menjadikan China sebagai “negara sosialis modern yang kaya, kuat, demokratis, beradab, dan harmonis”. Pemerintah China di bawah kepemimpinan generasi ke-5, tandem presiden Xi Jinping dan PM Li Keqiang, berkewajiban melanjutkan cita-cita para pemimpin sebelumnya, yaitu mewujudkan “masyarakat yang berkecukupan” pada tahun 2020-an sejajar dengan negara-negara maju di Eropa, dan tahun 2049 (1 abad berdirinya RRC) dapat menggeser posisi Amerika Serikat sebagai super power pertama dunia.<sup>4</sup>

Kelompok ‘Nasionalis’ (hawkins), yang didominasi oleh jajaran militer menterjemahkan China Dream menjadi kebangkitan kembali China, untuk mendapatkan tempatnya yang sah sebagai pengatur ketertiban dunia. Liu Mingfu, tentara berpangkat kolonel senior pada tahun 2010, telah menyuarakan posisi tentara tentang kebangkitan china melalui bukunya. “China Dream : Great Power Thinking and Strategic Posture in the Post American Era”. Dalam buku tersebut. Liu menegaskan bahwa China harus mendapatkan kembali posisinya sebagai bangsa terkuat di dunia suatu posisi



---

<sup>4</sup>M. Asruchin, “Antisipasi Meningkatnya Ketegangan Hubungan Amerika Serikat dan Dampaknya Terhadap Kepentingan Nasional Indonesia & Makalah Presentasi dalam Rapat Kerja Terbatas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Jakarta 11-13 Agustus 2020.



yang dimilikinya selama beribu tahun sebelum dipermalukan oleh penjajahan bangsa asing.<sup>5</sup>

Menanggapi hal ini, Amerika Serikat menganggap, bahwa kebangkitan RRT ini, diyakini dapat mengancam status quo-nya sebagai hegemoni global, sekaligus akan mengganggu kepentingan nasionalnya di seluruh dunia. Untuk itu, Amerika Serikat akan selalu berupaya untuk mempertahankan kekuasaan, pengaruh dan kepentingan ekonominya. Amerika Serikat selalu mempersepsikan RRT sebagai “potential enemies”. Hal ini disebabkan karena dari perspektif Amerika Serikat, RRT dapat dilihat sebagai kompetitor. Padahal, setelah perang dingin berakhir, beberapa negara besar berpotensi menjadi kompetitor Amerika Serikat, terutama RRT dan Rusia.

Tekanan Amerika Serikat pada RRT dalam beberapa tahun terakhir ini semakin menguat. Hal ini tercermin dari rivalitas kedua negara dalam sejumlah isu, seperti: Perang dagang, masalah Hong Kong, masalah Taiwan, polemik soal asal-usul virus pemicu pandemic Covid-19 dan Sengketa Laut China Selatan.<sup>6</sup> Amerika Serikat menuding RRT memanfaatkan perhatian dunia yang terfokus pada masalah pandemi Covid-19, untuk meningkatkan kehadirannya di Laut China Selatan. Bahkan ketegangan di Laut China Selatan meningkat saat RRT menggelar latihan militer selama lima hari di



---

<sup>5</sup>Ibid

<sup>6</sup>Bambang Cipto, Laut China Selatan Bergolak saat Pandemi. Kompas, 17 Mei 2020,

dekat kepulauan Paracel, mengerahkan dua kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan.<sup>7</sup>

Kekayaan alam di dalam dan di bawah laut, seperti minyak bumi, gas alam serta kekayaan ikan yang mencapai 10 persen kebutuhan dunia diperkirakan menjadi motif negara pantai termasuk China mengklaim sebagian atau keseluruhan perairan Laut China Selatan. Alasan utama China melakukan klaim lebih dari 85% perairan Laut China Selatan supaya mendapatkan kedudukan strategis untuk mengontrol lalu-lintas kapal di perairan tersebut. Laut China Selatan merupakan salah satu jalur transportasi perdagangan tersibuk senilai sekitar US\$ 5 trilyun/tahun. Sebagai ekonomi ke-2 terbesar di dunia, 60% nilai perdagangan China dilakukan melalui laut terutama Laut China Selatan.<sup>8</sup>

Klaim China atas Laut China Selatan yang didasarkan pada sejarah 'traditional fishing grounds' ditandai dengan garis 'Nine-dash line' telah digugurkan oleh keputusan PCA (Permanent Court of Arbitration) tahun 2016. Amerika Serikat bersama Australia, Jepang, dan India yang tergabung dalam 'quad' juga menentanginya dan menyerukan agar Laut China Selatan tetap menjadi perairan internasional, sehingga tetap terjaminnya Freedom of Navigation dan Overflight sesuai dengan UN Convention of the Law of the Sea (UNCLOS). Beijing meyakini Amerika Serikat sedang membangun koalisi Anti-China melibatkan 3 (tiga) negara Australia, India, Jepang, dan negara Kawasan Asia Tenggara.<sup>9</sup>



---

<sup>7</sup>Bambang Cipto Memahami Arah Rivalitas AS-China Kompas, 12 Juli 2020, hal 3

<sup>8</sup>M.Asruhin, op.cit

<sup>9</sup>Ibid

Selain itu, Peralatan perang China dan Amerika Serikat hilir-mudik di Laut China Selatan. Kapal induk pesawat pengebom yang bisa mengangkut hulu ledak nuklir, berbagai kapal perang, dan peluru kendali terjangkau hingga ribuan kilometer, dikerahkan Amerika Serikat-RRT. Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi, menyebut Permusuhan Amerika Serikat-RRT sebagai fakta yang mengkhawatirkan dan harus dihadapi.<sup>10</sup>

Dalam konteks seperti ini, negara-negara kecil dan menengah di Asia Tenggara, mau tidak mau menghadapi kondisi rivalitas yang dikhawatirkan, akan membawa konflik terbuka di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di Asia Tenggara berada pada posisi dilema. Hampir semua negara Asia Tenggara, menyatakan tidak ingin memilih antara berteman dengan Amerika Serikat atau RRT. Semua ingin mengambil manfaat dari RRT, yang tengah menjadi kekuatan ekonomi baru, dan Amerika Serikat sebagai pemain lama.

Dengan kata lain, RRT dan Amerika Serikat sama-sama penting bagi Asia Tenggara, Di mana RRT dan Amerika Serikat adalah mitra dagang penting bagi ASEAN. Dari hasil berdagang dengan RRT dan Amerika Serikat, Negara-negara Asia Tenggara memperoleh pendapatan untuk meningkatkan. Keberpihakan pada salah satu dari kedua negara tersebut bisa membuka peluang ancaman pada sumber kesejahteraan itu.<sup>11</sup>

Bagi Indonesia, Perkembangan rivalitas Amerika Serikat-RRT di Asia Tenggara, telah memberikan Implikasi langsung kepada Indonesia, yang kini telah berupaya tumbuh sebagai salah satu kekuatan besar di kawasan. Dalam

ghadapi perkembangan lingkungan strategis ini, respon Indonesia dalam

<sup>10</sup>Bambang Cipto "Asia Tenggara Bukan Piala". Kompas, 26 Oktober 2020, hal 4

<sup>11</sup>Ibid



kebijakan politik luar negeri mendapat tantangan besar, mengingat kontestasi kekuatan dan kehadiran kedua negara superpower itu, berlangsung cukup dominan.

Indonesia harus bisa menyeimbangkan kepentingan nasionalnya dengan keinginan Amerika Serikat-RRT yang merupakan mitranya. Dengan kata lain, Indonesia baik secara sendiri maupun bersama ASEAN, harus menekankan bahwa kepentingan kawasan Asia Tenggara, adalah dalam rangka kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Oleh sebab itu, Indonesia mesti cermat dan lincah di antara tarik-menarik pengaruh Amerika Serikat-RRT, dan negara-negara besar lainnya. Prinsip politik luar negeri Indonesia Bebas-Aktif tetap harus dikedepankan. Dalam konteks ini, Pemerintah Indonesia di uji. Indonesia sudah masuk dalam kelompok 20 negara (G20) dengan produk domestik bruto terbesar di dunia.<sup>12</sup>

Memang, tidak mudah melaksanakan politik luar negeri bebas-aktif seperti yang diamanatkan, Mohammad Hatta “mendayung di antara dua karang”. Dengan prinsip itu, politik luar negeri Indonesia tidak didasarkan pada sentimen, tetapi lebih pada aspek realitas dan kepentingan negara atau national interest. Namun, politik luar negeri sebuah negara termasuk Indonesia tidaklah bersifat statis, tetapi dinamis. Dalam arti, senantiasa berkembang menyesuaikan diri, dan harus mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia. Seperti halnya sekarang ini, ketika terjadi perubahan



<sup>12</sup>Bambang Cipto “Asia Tenggara Bukan Piala”. Kompas, 26 Oktober 2020, hal 4

lingkungan strategis di Asia Timur dan Tenggara, Indonesia harus mampu mengantisipasinya.<sup>13</sup>

Dengan kata lain, Indonesia harus semakin realistis, yakni berorientasi pada profit dan benefit, dengan terus mengupayakan kesempatan dan celah untuk keinginan bangsa dan negara. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia, benar-benar menjadi sarana untuk menunjukkan harga diri dan kebanggaan nasional.

Hal ini dapat dilihat dirasakan oleh Indonesia, dengan banyaknya simpati dan penghargaan yang telah diterima dalam dunia Internasional karena konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas-aktif. Hal ini dapat terjadi, lantaran Indonesia dianggap memiliki aset yang sangat besar, seperti : salah satu negara Demokrasi terbesar ketiga di dunia, dan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.

Konsistensi politik luar negeri Indonesia bebas-aktif ini, tercermin dalam rekam jejak diplomasi Indonesia, yang membuat negara-negara di dunia menghormati Indonesia dan menjadikan negara Indonesia bukan negara dan bangsa yang mudah dipengaruhi dan di tekan oleh negara manapun.

Dari uraian ini, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi, dengan judul **“Persaingan Amerika Serikat – RRT Kepada Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Politik Luar Negeri Bebas-Aktif”**



<sup>13</sup>Bambang Cipto "72 Tahun Politik Luar Negeri", Kompas, 21 Agustus 2017, hal.5



## B. Batasan Dan Rumusan Masalah

Mengingat Luas dan besarnya bidang Persaingan Amerika Serikat dan RRT kepada Indonesia, maka untuk memudahkan penulisan materi skripsi ini, penulis hanya membatasi pada bahasan tentang persaingan dalam bidang militer-strategis, dan pengaruhnya bagi politik luar negeri Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara demikian pula, penulis dapat merumuskan pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi persaingan Amerika Serikat-RRT kepada Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh persaingan tersebut terhadap Politik Luar Negeri Bebas-Aktif?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya, tujuan penelitian ini, adalah :

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi persaingan Amerika Serikat-RRT kepada Indonesia
- b. Untuk mengetahui pengaruh persaingan tersebut terhadap Politik Luar Negeri Bebas-Aktif

### 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun minat pada materi yang ditulis dalam skripsi ini, untuk menjadi bahan referensi, baik yang

berdimensi Akademik maupun praktis, yakni:



a. Kegunaan Akademik

Materi skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan informasi bagi para mahasiswa Hubungan Internasional pada khususnya, dan secara umum kepada para pemerhati masalah-masalah Internasional mengenai kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur, khususnya yang menyangkut persaingan Amerika Serikat-RRT, serta Pengaruhnya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia Bebas-Aktif.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis ini diharapkan untuk menjadi bahan masukan kepada para stakeholder, untuk perumus dan penentu kebijakan (Pemerintah dan Legislatif) dalam membuat suatu kebijakan dalam Politik Luar Negeri Indonesia, yang bersifat Bebas-Aktif.

## D. Kerangka Konseptual

### 1. Persaingan

Makna persaingan di sini, dimaksudkan bahwa dalam konteks Hubungan Internasional terdapat interaksi antar-negara satu sama lain. Dimana dalam interaksi tersebut, sering memunculkan sifat saling menyaingi atau mengungguli yang di dalamnya tidak jarang menimbulkan ketegangan baik di wilayah domisili dari masing-masing negara maupun pada kawasan di luar wilayahnya.

Di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur misalnya dua negara superpower saling bersaing, yakni Amerika Serikat dan RRT, Dimana, keduanya terlibat persaingan dalam bidang : Ekonomi, Politik, dan Militer



strategis. Dasar persaingannya adalah untuk menjaga dan melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing, Persaingan secara definisi dinyatakan oleh Teuku May Rudy, bahwa:

Persaingan antar-negara merupakan aksi saling mencurigai dan ketidakpercayaan yang mengakibatkan aksi spionase, membentuk persekutuan militer menghadapi saingannya, berusaha menanamkan pengaruh yang sebesar-besarnya dan membatasi pengaruh saingannya.<sup>14</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Teuku May Rudy dari definisi di atas, sangat relevan dengan fenomena-fenomena yang terjadi di Asia Timur dan Asia Tenggara, dimana RRT yang muncul sebagai kekuatan baru dunia akibat perkembangan militer dan kemajuan ekonominya, berusaha untuk berpengaruh dan menguasai kawasan dalam bentuk mengklaim kepemilikannya terhadap perairan Laut China Selatan, serta terus mengembangkan peralatan militernya yang super canggih.

Menanggapi hal ini, Amerika Serikat sebagai penguasa “status quo” kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara merasa terusik dengan kehadiran dan penguasaan RRT tersebut. Untuk merespons hal itu Amerika Serikat berusaha mengimbangi bahkan menangkai kemajuan RRT tersebut. Hal ini ditandai dengan Gelar pasukan Marinir Amerika Serikat dalam bentuk penempatan 2-500 personil marinir di pangkalan militer Australia, sebagai bagian dari memperkuat komando pasifiknya, sekaligus melengkapi penempatan pasukan yang sudah sejak lama ada di Okinawa, Jepang.<sup>15</sup>



---

<sup>14</sup>Teuku May Rudy Studi Kawasan : Sejarah Diplomasi dan Perkembangan Politik Asia. Bandung : Bina Budhaya, hal. 25

<sup>15</sup>Poltak Partogi Nainggolan “Perubahan strategi keamanan. Amerika Serikat di -Pasifik dan Respon Indonesia. Jakarta : CSIS, vol 42, No 4, hal 495-496.

Apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini dipicu oleh kekhawatiran terhadap pertumbuhan kekuatan militer RRT secara drastis, yang dianggap telah menjadi ancaman bagi dominasi militer Amerika Serikat di kawasan. Untuk itu, Amerika Serikat bertekad untuk mengatasi kebangkitan militer RRT dengan cara-cara yang lebih canggih.

## 2. Pengaruh

Yang dimaksud pengaruh disini, adalah pengaruh yang berkonotasi negatif dari hasil persaingan Amerika Serikat-RRT kepada Indonesia, terhadap Politik Luar Negerinya yang bersifat Bebas-Aktif.

## 3. Bebas-Aktif

Pengertian Bebas-Aktif dalam Politik Luar Negeri Indonesia, adalah: prinsip Bebas, berarti bebas menentukan kebijakan Luar Negeri sendiri tanpa pengaruh dari pihak manapun. Sedangkan Aktif, berarti Aktif melakukan hubungan yang bersahabat dengan segala bangsa untuk menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia.

## E. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta tentang Persaingan Amerika Serikat-RRT Kepada Indonesia dan Pengaruhnya Terhadap Politik Luar Negeri Bebas-Aktif.



## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berupa buku, jurnal, artikel, dokumen dari berbagai media, baik elektronik maupun non elektronik.

Adapun bahan-bahan tersebut akan dicari :

- a. Pusat Kajian Amerika Universitas Indonesia di Jakarta.
- b. Centre for Strategic and International Studies di Jakarta (CSIS)
- c. Perpustakaan Ali Alatas, Kemlu R.I di Jakarta
- d. Pusat Kewilayahan dan Politik LIPI di Jakarta

## 3. Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisis data hasil penelitian dengan teknik analisis data kualitatif.

## 4. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan oleh penulis ialah metode deduktif, yaitu dengan menggambarkan secara umum masalah yang diteliti kemudian menarik kesimpulan secara khusus dalam menjelaskan hasil analisis penulisan ini.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Tentang Persaingan

Dalam konteks Hubungan dan Politik Internasional, terjadinya persaingan antar negara adalah hal yang lumrah. Hal ini terjadi karena hakekatnya, setiap negara akan selalu melakukan interaksi satu sama lain yang saling bersinggungan dalam memperjuangkan kepentingannya. Dengan kata lain, persaingan antar-negara merupakan konsekuensi dalam memperebutkan objek yang sama.

Salah seorang pakar Hubungan Internasional, Teuku May Rudy mendefinisikan persaingan sebagai: Persaingan antar kekuatan dunia telah berlangsung sejak dahulu dan akan terus berlangsung hingga Hari Kiamat. Hubungan Internasional yang selalu diwarnai persaingan antar sesama negara untuk mencapai status keadilan.

Ini sebabnya situasi internasional tidaklah stabil dan selalu berubah. Lebih lanjut dikatakannya : Persaingan antar negara merupakan aksi saling mencurigai dan ketidakpercayaan yang mengakibatkan aksi spionase, membentuk persekutuan militer menghadapi saingannya, berusaha menanamkan pengaruh yang sebesarnya dan membatasi pengaruh saingannya.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup>Rudy, op. cit. hal.25

Amerika Serikat dan RRC memiliki perbedaan ideologi. Kedua negara pun memiliki sosial kapita yang tinggi. Hal inilah yang menyebabkan munculnya persaingan antar keduanya. Amerika Serikat harus sekuat mungkin mencegah kekuatan asing maupun yang bisa mendominasi suatu wilayah yang sumber alaminya, ketika terkontrol secara solid, akan mampu mendukung terbentuknya kekuatan global.

Ada berbagai bentuk persaingan antar negara, antara lain persaingan ekonomi, budaya, politik dan kemajuan teknologi. Persaingan antar negara juga terwujud dalam perebutan pengaruh dan perimbangan kekuasaan dan kekuatan militer. Dalam teori perimbangan kekuatan atau yang lebih dikenal dengan teori “Balance of Power” dikatakan bahwa dunia ini terbagi atas dua kekuatan yang saling bersaing mendapatkan pengaruh dan mencoba untuk menang atas wilayah yang menimbulkan adanya perimbangan kekuasaan.<sup>17</sup>

Munculnya RRC sebagai kekuatan adidaya menimbulkan ketakutan tersendiri bagi Amerika Serikat dalam menyikapi perkembangan RRC yang begitu pesat dalam upayanya untuk mencegah bangkitnya kekuatan adidaya baru. Dapat dikatakan bahwa dalam menyikapi masalah tersebut, Amerika Serikat menggunakan cara-cara yang spesifik.

Dalam melaksanakan kebijakan ini, Amerika Serikat berusaha untuk mengintervensi dan menjalin kerjasama dengan negara-negara RRC yang juga memiliki ketakutan yang sama dengan Amerika Serikat apabila RRC

muncul sebagai kekuatan adidaya baru, dimana negara-negara tersebut

---

<sup>17</sup>Rudy, Ibid



merupakan negara tetangga RRC sendiri. Persaingan antar negara, lebih lanjut menimbulkan perselisihan, dan kemudian menimbulkan konflik.

Persaingan antara Amerika Serikat dan RRC seringkali membawa ancaman keamanan internasional dan bisa menimbulkan perang. Perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri. Oleh karena itu persaingan antar negara adidaya satu sama lain telah memunculkan apa yang dinamakan konferensi internasional dan pakta-pakta.

## **B. Konsep Tentang Politik Luar Negeri**

Pada hakekatnya, politik luar negeri adalah seperangkat kebijakan suatu negara yang ditujukan untuk ke negara lain dalam rangka untuk mencapai kepentingannya. Dimana, Politik luar negeri setiap negara dirumuskan dengan mempertimbangkan segala potensi yang dimilikinya, serta melibatkan segenap unsur penentu kekuasaan di dalam negerinya.

Negara sebagai salah satu aktor Hubungan Internasional harus memperhitungkan potensi-potensi apa saja yang mereka miliki, sehingga dapat menjamin terselenggaranya hubungan antar bangsa dan antar negara secara tertib dan konsisten. Potensi yang dimaksud di sini adalah potensi ekonomi, politik, dan potensi militer termasuk keamanan dan pertahanan negara. Sehingga, negara yang memiliki potensi tersebut tentunya memiliki potensi yang berbeda terhadap lingkungan internasional.

Secara umum, politik luar negeri adalah kebijakan suatu negara yang diarahkan ke negara lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Di mana,



politik luar negeri merupakan suatu perangkat formulasi, nilai, sikap, arah, dan sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam peraturan dunia internasional.

Sedangkan secara teoritis, politik luar negeri adalah kebijakan atau strategi yang digunakan oleh suatu negara dalam melaksanakan interaksi dengan negara lain dalam usaha mencapai tujuan nasional. Dengan kata lain, politik luar negeri merupakan bagian dari kebijaksanaan nasional yang tidak dapat dipisahkan dari kondisi nyata alam negeri.<sup>18</sup>

Disamping itu, kebijakan politik luar negeri dijalankan untuk dapat menjawab kebutuhan dan disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara. Karena itu, semuanya dikaitkan dengan apa yang menjadi kepentingan yang ada dalam setiap negara. Kebijakan politik luar negeri merupakan kebijakan-kebijakan yang diambil suatu negara mengenai hubungan atau tindakan-tindakan yang melalui batas negara. Kebijakan politik luar negeri dapat berupa hubungan diplomatik, mengeluarkan doktrin, membuat aliansi, dan mencanangkan tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.

Terdapat banyak ahli yang mencoba untuk mendefinisikan kebijakan luar negeri dengan penekanan yang berbeda-beda. Sebuah definisi singkat mengenai kebijakan politik luar negeri disimpulkan oleh Christopher Hill sebagai berikut: *“the sum of official external relations conducted by an*



<sup>18</sup>Abu Bakar Eby Hara. 2011. Pengantar Analisis Politik Luar Negeri. Bandung :  
nsa. Hal.15

*independent actor (usually a state) in international relations.*<sup>19</sup> Definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan politik luar negeri adalah jumlah dari hubungan eksternal yang dijalankan oleh aktor, yang ada umumnya adalah negara, dalam hubungan internasional.

Kemudian, K. J. Holsti mendefinisikan foreign policy as the analysis of decisions of a state toward the external environment and the condition-usually domestic under which these actions are formulated.<sup>20</sup> Definisi ini menjelaskan bahwa kebijakan politik luar negeri sebagai analisis keputusan atau kebijakan dari suatu negara terhadap lingkungan internasional yang berkaitan dengan kondisi domestik negara tersebut, yang menjadi sumber kebijakan politik luar negeri itu terbentuk.

Selanjutnya Walter Carlsnaes memberikan definisi klasik dan detail mengenai kebijakan politik luar negeri, yaitu:

“Tindakan-tindakan yang diarahkan ke tujuan, kondisi dan actor (baik pemerintah maupun non pemerintah) yang berada di luar wilayah teritorial mereka dan yang ingin mereka pengaruhi. Tindakan-tindakan itu diekspresikan dalam bentuk tujuan-tujuan, komitmen, dan atau arah yang dinyatakan secara eksplisit, dan yang dilakukan oleh wakil-wakil pemerintah yang bertindak atas nama negara atau komunitas yang berdaulat.<sup>21</sup>

Lebih lanjut, menurut Mark R. Amstutz, kebijakan politik luar negeri sebagai *explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interests beyond a country's territorial boundaries*. Dalam

---

<sup>19</sup>Christopher Hill. 2003. The Changing Politics of Foreign Policy. New York :  
rave Macmilan hal.3

<sup>20</sup>K.J. Holsti. 1970. National Role Conceptions in the study of Foreign Policy.  
International studies Quarterly. Vol.14. NO.3 Hal.233-309. Terdapat dalam  
s://www.jstor.org/stable/3013584?Spc1=23#Page\_scan\_tab\_contents

<sup>21</sup>Carlsnaes. 2002. Terdapat dalam Abu Bakar Eby Hara. 2011. Hal.15-16



definisi ini, ada tiga hal yang ditekankan di dalamnya, yaitu tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian kepentingan nasional, dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas wilayah suatu negara.<sup>22</sup>

Dengan demikian, disimpulkan, bahwa semua kebijakan pemerintah yang membawa dampak bagi aktor-aktor lain di luar batas wilayahnya, secara konseptual merupakan bagian dari pengertian kebijakan politik luar negeri. Definisi ini memberikan pemahaman bahwa kebijakan politik luar negeri mencakup dimensi yang luas, baik itu ekonomi, keamanan, maupun sosial budaya.<sup>23</sup>

Definisi kebijakan politik luar negeri juga dinyatakan oleh Kegley dan Wittkopf, yang menekankan kebijakan politik luar negeri sebagai the decisions governing authorities make to realize international goals. Definisi ini menekankan kepada peranan kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang harus sesuai dengan tujuan internasional yang berkaitan dengan negara tersebut. Kedua penulis menekankan bahwa studi kebijakan politik luar negeri harus memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat yang digunakannya untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>24</sup>

Dengan demikian, secara umum, dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri, merupakan konsep yang digunakan oleh negara atau pemerintah, maupun aktor non pemerintah sebagai acuan dan pedoman dalam



---

<sup>22</sup>Mark R. Amstutz. 1995. Terdapat dalam Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dan Teori dan Praktek Jogjakarta : Graha Ilmu. Hal.64

<sup>23</sup>Ibid.

<sup>24</sup>Charles W. Kegleny Jr. dan Eugene R. Wittkopf. 2003 terdapat dalam Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam teori dan Praktik. Jogjakarta : Graha Ilmu. Hal.65.

berhubungan dengan pihak-pihak di lingkungan eksternal dan internasional, yang mewakili kepentingan internal atau domestik suatu negara.

Kebijakan politik luar negeri merupakan perpanjangan dari kebijakan politik dalam negeri yang terbentuk berdasarkan kepentingan nasional suatu negara. Itulah sebabnya, kebijakan luar negeri setiap negara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan sosial masing-masing negara. Kebijakan yang diimplementasikan dalam suatu negara berimplikasi pada kebijakan politik luar negerinya. Karena itu, kebijakan dalam negeri harus stabil dan jelas arah dan tujuannya, sehingga menghasilkan kestabilan politik luar negeri yang berlaku di tingkat internasional.

Seiring dengan berkembangnya dunia internasional, politik luar negeri suatu negara dapat berubah-ubah sesuai dengan urgensi kebutuhan negara yang bersangkutan dan bagaimana kebijakan dalam negerinya berjalan. Ada unsur-unsur dalam kebijakan politik luar negeri yang dapat tetap dipertahankan, ada pula unsur-unsur dalam kebijakan politik luar negeri yang dapat tetap dipertahankan, ada pula unsur-unsur yang harus mengalami perubahan.<sup>25</sup>

Banyak faktor yang mendorong suatu negara untuk melakukan perubahan dalam kebijakan politik luar negerinya, baik yang bersumber pada lingkungan domestik mau pun bersumber pada perkembangan lingkungan eksternal yang perlu diantisipasi untuk pencapaian tujuan nasional.



<sup>25</sup>Aleksius Jemadu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik, ed. 1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Hal. 62.



Dalam buku yang berjudul *Foreign Policy in Comparative Perspective: Domestic and International Influences on State Behavior*, Juliet Kaarbo, Jeffrey S. Lantis, dan Ryan K. Beasley melakukan studi perbandingan kebijakan luar negeri dari berbagai negara. Mereka membedakan antara faktor-faktor eksternal dan domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri.

Dari hasil studi perbandingan tersebut, mereka pun menyebutkan:

Dua faktor internasional yang mempengaruhi perilaku negara dalam politik global yaitu persoalan anarkhi dan kekuasaan, serta persoalan ketergantungan atau dependensi dan interdependensi dalam sistem internasional. Dua faktor ini dianggap relevan untuk menganalisis kebijakan politik luar negeri negara-negara berkembang, karena masalah ketergantungan ekonomi merupakan determinan utama bagi mereka yang menentukan kiprahnya dalam politik global. Faktor internal meliputi berbagai ranah masing-masing dalam persoalan tersendiri yang mempengaruhi kebijakan luar negeri.<sup>26</sup>

Dengan demikian, hasil studi perbandingan tersebut menunjukkan perilaku negara dalam politik internasional, yang terlihat melalui kebijakan luar negerinya, dipengaruhi oleh faktor kekuasaan dan persoalan ketergantungan, khususnya bagi negara berkembang, adalah ketergantungan dalam bidang ekonomi. Selain itu, kebijakan politik luar negeri juga dipengaruhi dari berbagai faktor lainnya, seperti opini publik dan budaya, persoalan demokrasi dan birokrasi dalam negeri, serta dari ranah pemimpin, yaitu faktor kepribadian seorang pemimpin negara.<sup>27</sup>



---

<sup>26</sup>Ibid. Hal.78-79

<sup>27</sup>Ibid

Pendapat lain juga muncul dengan mengemukakan ide tentang foreign policy influences melalui tiga tingkat analisis. Tingkat analisis yang pertama, merupakan tingkat analisis yang paling luas, yaitu global influences, yang mewujudkan karakteristik dasar politik dan ekonomi global yang berlaku. Tingkat analisis berikutnya adalah state or internal influences yang diwujudkan dalam bentuk rezim politik yang berkuasa dan budaya masyarakat pada umumnya. Kemudian, tingkat yang terakhir adalah individual influences, yang menyatakan bahwa kepribadian dan sistem nilai yang dianut pemimpin negara, dapat mempengaruhi pembuatan kebijakan politik luar negeri.<sup>28</sup>

Untuk dapat mengerti dinamika dari kebijakan politik luar negeri, hal yang penting untuk diperhatikan adalah proses pembentukan kebijakan politik luar negeri tersebut. Para ahli kemudian berusaha menjelaskan peran aktor dan struktur yang selalu terlibat dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri. Hubungan erat antara kedua faktor tersebut, dikemukakan oleh Christopher Hill, yaitu:

“Foreign policy making is a complex process of interaction between many actors, differentially embedded in a wide range of different structures. Their interaction is a dynamic process, leading to the constant evolution of both actors and structures.”<sup>29</sup>

Hal ini menunjukkan, peranan aktor dan struktur dalam suatu negara sangatlah penting dalam pembentukan kebijakan politik luar negeri. Aktor-



---

<sup>28</sup>Ibid

<sup>29</sup>Christopher Hill. 2003. Terdapat dalam Steve Smith, Amelia Hadfield, dan Tim ne. 2012. Foreign Policy : theoris, actors, cases (second edition). New York : Oxford iversity Pres. Hal. 114

aktor yang paling berperan penting adalah kepala negara atau kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau sekretaris negara, parlemen, partai politik, dan lain-lain. Aktor-aktor inilah yang memiliki tanggung jawab politik dalam pembentukan kebijakan, yang dimulai dari kebijakan domestik yang kemudian berimplikasi pada kebijakan politik luar negeri.

### C. Konsep Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang sudah sangat familiar digunakan dalam ilmu hubungan internasional. Konsep kepentingan nasional mengandung tujuan fundamental dan sekaligus sebagai penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan politik luar negerinya.

Pada hakekatnya, kepentingan nasional dan politik luar negeri merupakan konsep yang saling terkait, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain bagi suatu negara, khususnya dalam kaitan dengan negara lain, baik dalam konteks hubungan bilateral, regional, maupun dalam konteks global. Konsep kepentingan nasional dapat digunakan sebagai peran untuk menjelaskan perilaku setiap negara dalam politik internasional. Selain itu, konsep kepentingan nasional juga merupakan salah satu faktor yang mendasar sebagai penuntun bagi pengambil kebijakan dalam suatu negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negeri.

Hal ini dapat terjadi, karena setiap negara akan mengalami kesulitan dalam menentukan kebijakan luar negerinya, tanpa menentukan lebih dahulu kepentingan nasional sebagai tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata



lain kepentingan nasional merupakan pencerminan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam negeri, serta perjuangan pemenuhan kebutuhan bagi setiap negara.

Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud di sini dapat meliputi kebutuhan ekonomi, sosial budaya, ideologi, politik, serta pertahanan keamanan. Lebih dari itu, juga menyangkut kebutuhan akan perwujudan integritas, stabilitas nasional yang dapat memberi pengaruh positif terhadap terciptanya stabilitas dan ketertiban internasional.

Kepentingan nasional suatu negara harus dilindungi dan berusaha untuk terus dipertahankan dari segala kemungkinan ancaman dari pihak lain. Dalam konteks memperjuangkan kepentingan nasional, sering terjadi adanya perbedaan dan bahkan konflik-konflik, baik yang bersifat bilateral, multilateral, bahkan bersifat global. Kepentingan nasional merupakan kunci dalam kebijakan dan pelaksanaan politik luar negeri. Dengan asas ini, konsep kepentingan nasional dapat digunakan sebagai barometer keberhasilan politik luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah dari suatu negara. Salah satu definisi kepentingan nasional, menyatakan :

“Kepentingan nasional berkaitan dengan beberapa kumpulan cita-cita dari tujuan suatu negara-bangsa yang berusaha dicapainya melalui hubungan dengan negara lain. Dengan kata lain, kepentingan nasional dianggap sebagai yang harus dicapai suatu negara secara tetap melalui kepemimpinan pemerintah.”<sup>30</sup>

Sementara itu, pengertian lain menyatakan bahwa kepentingan nasional meliputi keseluruhan arti yang ditentukan oleh tradisi-tradisi politik

<sup>30</sup>K. J. Holsti. Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Jilid I. Penerjemah M. r Azhari. Jakarta: Erlangga, 1988, hal. 136.



dalam seluruh konteks kultural, dimana suatu negara merumuskan politik luar negerinya. Selain itu, kemampuan minimum negara, adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan pihak lain.

Kepentingan nasional suatu negara, pada hakekatnya bersifat sementara, dan dapat berubah-ubah sesuai waktu, situasi, dan juga tergantung kondisi atau perubahan yang terjadi dalam dunia internasional. Perbaikan dalam mencapai kepentingan nasional, merupakan konsekuensi dari kesiapan untuk menghadapi perubahan domestik, regional, maupun internasional. Hal ini dimaksudkan, agar apabila suatu ketika terjadi permasalahan, maka sudah barang tentu setiap negara harus memperkuat diri, agar tidak terkena dampak buruk dari permasalahan tersebut.

Menurut Paul Seabury, sebagaimana dikutip oleh K.J. Holsti, kepentingan nasional pada dasarnya adalah :

Suatu gambaran keadaan peristiwa masa depan dan rangkaian kondisi di kemudian hari yang ingin diwujudkan pemerintah melalui pembuatan kebijakan luar negeri dengan menggunakan pengaruh di luar negeri dan dengan mengubah atau mendukung sikap negara lain.<sup>31</sup>

Merujuk pada definisi kepentingan nasional tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kepentingan nasional dan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Budiono Kusumohamidjojo:

Kepentingan nasional (national interest) dengan demikian merupakan prinsip yang fundamental dalam kerangka politik luar negeri, sehingga pembicaraan mengenai sasaran politik



<sup>31</sup>Ibid.

luar negeri harus didahului dengan penjelasan mengenai pengertian kepentingan nasional.<sup>32</sup>

Dalam praktek kehidupan bernegara, kepentingan nasional dijadikan kriteria pokok bagi para pengambil keputusan dari masing-masing negara, sebelum merumuskan dan menetapkan sikap atau tindakan. Hal ini dikarenakan mereka harus memperhatikan segala aspek dari kepentingan nasional itu sendiri, dan berbagai masalah dari lingkungan eksternalnya.

Oleh karena itu, perumusannya lebih merupakan seperangkat tujuan yang ideal, yang diusahakan pencapaiannya dalam merealisasikan politik luar negerinya. Bahkan setiap langkah kebijakan luar negeri, perlu berlandaskan kepentingan nasional dan diarahkan untuk mencapai serta melindungi apa yang dikategorikan atau ditetapkan sebagai kepentingan nasional itu.

Kepentingan nasional merupakan pernyataan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam negeri, yang diharapkan terpenuhi dengan cara melakukan hubungan ke luar negeri, baik berupa hubungan bilateral maupun multilateral. Pada sisi lain, konsep ini juga diarahkan pada tanggungjawab internasional dari setiap negara di dunia, yakni untuk menciptakan suatu ketertiban dan perdamaian internasional.

Sebagai suatu konsep, kepentingan nasional merupakan suatu hal yang paling umum digunakan dalam pembahasan politik luar negeri. Dimana, konsep ini sering dipakai sebagai dasar untuk menjelaskan perilaku suatu negara dalam politik internasional. Seringkali konsep ini juga dipakai sebagai

ukuran keberhasilan suatu politik luar negeri, karena jika disebut dari unsur-

<sup>32</sup>Budiono Kusumohamidjojo. Hubungan internasional kerangka studi analisis. Jakarta: Bina Cipta, 1987. Hal. 35.



unsur fundamentalnya, politik luar negeri suatu negara, dapat terdiri dari dua elemen utama, yakni tujuan nasional yang akan dicapai dan instrumen yang dimiliki suatu negara untuk mencapainya.

Tujuan nasional yang ingin dicapai suatu negara, dapat dilihat dari kepentingan nasional yang dirumuskan para elit dari suatu negara, sedangkan instrumen untuk mencapai tujuan nasional tersebut, tergambar dari strategi diplomasi yang merupakan implementasi dari kebijakan politik luar negeri yang telah dirumuskan.<sup>33</sup>

Dengan mengaitkan kedua elemen ini, maka dapat dinilai sejauhmana keberhasilan politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Manakala politik luar negeri yang dijalankan oleh suatu negara, memiliki suatu strategi diplomasi tertentu yang secara efektif, dapat melindungi pencapaian kepentingan nasional negara tersebut, maka itu dapat dikatakan berhasil.

Kepentingan nasional diakui sebagai konsep dalam politik luar negeri. Sepanjang sejarah mengenai kepentingan nasional, bisa berorientasi kepada ideologi atau berorientasi kepada sistem nilai sebagai pedoman perilaku. Dalam arti lain, keputusan dan tindakan politik luar negeri, bisa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan ideologis atau atas pertimbangan-pertimbangan kepentingan.

Dalam proses pencapaiannya, menjadi kewajiban serta keharusan bagi negara untuk memperjuangkan kepentingannya. Setiap bangsa dan

<sup>33</sup>Mochtar Mas'ood. Teori dan Metodologi Hubungan Internasional. Jakarta: LP3ES. 2000. Hal 141.





negara dituntut untuk merumuskan suatu kebijaksanaan dan strategi yang dianggapnya tepat agar kepentingan nasionalnya tidak dirugikan, dan selalu berusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam pergaulannya dengan dunia luar yang menjadi lingkungannya.

Sebagai upaya pencapaian kepentingan nasional tersebut, digunakan cara dan strategi. Cara atau alat yang dimaksud adalah melalui politik luar negeri. Karena politik luar negeri merupakan salah satu sisi strategi nasional yang di dalamnya berisi pedoman dan kekuatan-kekuatan mengenai bagaimana suatu negara melakukan interaksi dengan negara lain.

Dalam pelaksanaannya, politik luar negeri suatu negara harus selalu disesuaikan dengan tujuan nasionalnya, tepatnya harus mendukung tercapainya tujuan nasional, karena kepentingan-kepentingan nasional merupakan turunan dari tujuan nasional. Dengan terbentuknya kepentingan nasional, maka akan melahirkan suatu kebijaksanaan yang berkenaan dengan perlindungan rakyat, integritas wilayah, kedaulatan, dan sebagainya.

Adanya kepentingan nasional memberikan gambaran bahwa terdapat aspek-aspek yang menjadi identitas dari negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana fokus negara dalam memenuhi target pencapaian demi kelangsungan bangsanya. Dari identitas yang diciptakan dapat dirumuskan apa yang menjadi target dalam waktu dekat, bersifat sementara ataupun juga demi kelangsungan jangka panjang. hal demikian juga sering dengan

apa penting identitas tersebut apakah sangat penting maupun sebagai hal tidak terlalu penting.



Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan, dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh oleh negara yang bersangkutan.<sup>34</sup> Hal ini dapat menjelaskan bahwa kepentingan nasional sebuah negara bergantung dari sistem pemerintahan yang dimiliki, negara-negara yang menjadi partner dalam hubungan diplomatik, hingga sejarah yang menjadikan negara tersebut menjadi seperti saat ini, merupakan tradisi politik. Sedangkan tradisi dalam konteks kultural dapat dilihat dari cara pandang bangsanya yang tercipta dari karakter manusianya sehingga menghasilkan kebiasaan-kebiasaan yang dapat menjadi tolak ukur negara sebelum memutuskan menjalankan kerjasama.

Dalam bukunya Mochtar Mas'ood, menjelaskan konsep ini sama dengan menjelaskan kelangsungan hidup. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kelangsungan hidup tercipta dari adanya kemampuan minimum. Kemampuan minimum tersebut dapat dilihat dari kepentingan suatu negara yang dihubungkan dengan negara lain.

Hal tersebut menjelaskan bagaimana sebuah kepentingan dapat menghasilkan kemampuan akan menilai kebutuhan maupun keinginan pribadi yang sejalan dengan itu berusaha menyeimbangkan akan kebutuhan maupun keinginan dilain pihak. Konsep ini juga menjelaskan seberapa luas cakupan



<sup>34</sup>Suffri Yusuf. Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri: Analisis Teoritis dan Pelaksanaannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989, hal 79.

dan seberapa jauh sebuah kepentingan nasional suatu negara harus sesuai dengan kemampuannya.<sup>35</sup>

Kemampuan disini menjadi batasan yang didukung dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA). Kepentingan-kepentingan suatu negara dalam menjelaskan identitas mereka, memiliki kegunaan-kegunaan. Hal ini dalam penjelasan kepentingan nasional itu sendiri digambarkan oleh penjabaran James N. Rosenau yang mana kegunaan pertama, sebagai istilah analisis untuk menggambarkan, menjelaskan atau mengevaluasi politik luar negeri dan yang berikutnya yaitu sebagai alat tindakan politik yaitu sebagai sarana guna mengancam, membenarkan ataupun mengusulkan suatu kebijakan.<sup>36</sup>

Dengan demikian negara yang menjalin kerjasama tidak akan menyesal suatu saat nanti. Kondisi ini memperjelas akan tindakan langsung maupun tidak langsung yang dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang berencana melakukan kerjasama. Ini juga dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan pengamatan akan kondisi internal negara yang akan menjadi partner kerjasama. Dalam kepentingan nasional, terdapat perbedaan yang mendasar yakni; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat non-vital atau sekunder.

Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (core values) yang



---

<sup>35</sup>Ibid. Hal. 166

<sup>36</sup>Mochtar Mas'ood. 1994 Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: Pustaka LP3ES. Hal. 34. Ilmu Hubungan

menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional non-vital atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri.<sup>37</sup>

Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama.

Dalam analisis kepentingan nasional, peran aktor dalam hal ini negara, akan mengejar apapun yang dapat membentuk dan mempertahankan, pengendalian suatu negara atas negara lain. Pengendalian tersebut berhubungan dengan kekuasaan yang tercipta melalui teknik-teknik paksaan ataupun kerjasama.<sup>38</sup>



---

<sup>37</sup> Aleksius Jermandu. 2008. Politik Global dalam Teori dan Praktik. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. Hal. 67-69

<sup>38</sup>Ibid, Hal. 68